



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Mayjend. S. Parman No. 2 Kendari, Telp. 0401-3126053 Fax. 0401-3126172  
website : dpmptsp.sultraprov.go.id - email : info.dpmptsp@sultraprov.go.id



**DETAIL DAN DAFTAR PERSYARATAN IZIN**

Nama Izin : REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RENCANA MAKRO PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI DARI GUBERNUR UNTUK IUP YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA

Deskripsi : REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RENCANA MAKRO PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI DARI GUBERNUR UNTUK IUP YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA

Sektor : PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA

Delegasi : DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA

Biaya : Tidak Ada

Durasi : 17 hari kerja

Perubahan Terakhir : 22 May 2018, Pukul 06:08:44 WITA

Dicetak Pada : 07 Aug 2025, Pukul 14:11:29 WITA

**Persyaratan - Baru**

No	Syarat	Deskripsi	Jenis Pemohon	Ket.	Format Persyaratan
1	Surat Permohonan Bermaterai Ditujukan Kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara	Surat Permohonan Bermaterai Ditujukan Kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
2	Rekaman NPWP Pemohon	Rekaman NPWP Pemohon	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
3	Rekaman Identitas Pemohon	Rekaman Identitas Pemohon	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
4	Rekaman NPWP Perusahaan/Organisasi/Instansi	Rekaman NPWP Perusahaan/Organisasi/Instansi	Perusahaan	Wajib	-
5	Profil Perusahaan Meliputi Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Yang Telah Disahkan Oleh KEMENKUMHAM, Komposisi Kepemilikan Saham, Susunan Pengurus, dan Bidang Usaha Perusahaan	Profil Perusahaan Meliputi Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Yang Telah Disahkan Oleh KEMENKUMHAM, Komposisi Kepemilikan Saham, Susunan Pengurus, dan Bidang Usaha Perusahaan	Perusahaan	Wajib	-
6	Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan Dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan Dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
7	Rencana Kerja Pembangunan Kebun Perusahaan (Termasuk Rencana Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar)	Rencana Kerja Pembangunan Kebun Perusahaan (Termasuk Rencana Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar)	Perusahaan	Wajib	-
8	Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Tentang Kemampuan Perusahaan Untuk Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Tentang Kemampuan Perusahaan Untuk Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Perusahaan	Wajib	-
9	Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Tentang Kemampuan Perusahaan Untuk Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Serta Pengendalian Kebakaran	Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Tentang Kemampuan Perusahaan Untuk Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Serta Pengendalian Kebakaran	Perusahaan	Wajib	-
10	Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Tentang	Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Tentang Kemampuan	Perusahaan	Wajib	-

	Kesanggupan Perusahaan Untuk Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Yang Dilengkapi Dengan Rencana Kerja dan Rencana Pembiayaan	Perusahaan Untuk Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Yang Dilengkapi Dengan Rencana Kerja dan Rencana Pembiayaan			
11	Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Tentang Kesanggupan Perusahaan Untuk Melaksanakan Kemitraan Dengan Pekebun, Karyawan dan/atau Masyarakat Sekitar Perkebunan	Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Tentang Kesanggupan Perusahaan Untuk Melaksanakan Kemitraan Dengan Pekebun, Karyawan dan/atau Masyarakat Sekitar Perkebunan	Perusahaan	Wajib	-
12	Surat Pernyataan Dari Perusahaan Bahwa Status Perusahaan Perkebunan Sebagai Usaha Mandiri atau Bagian Dari Kelompok (Grup) Perusahaan Perkebunan Belum Menguasai Lahan Melebihi Batas Paling Luas Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pendoman Perizinan Usaha Perkebunan	Surat Pernyataan Dari Perusahaan Bahwa Status Perusahaan Perkebunan Sebagai Usaha Mandiri atau Bagian Dari Kelompok (Grup) Perusahaan Perkebunan Belum Menguasai Lahan Melebihi Batas Paling Luas Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pendoman Perizinan Usaha Perkebunan	Perusahaan	Wajib	-
13	Surat Bebas Fiskal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Surat Bebas Fiskal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
14	Surat Kuasa Surat kuasa bermaterai bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha	Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha	Perorangan, Perusahaan	Optional	-
15	Rekaman KTP Kuasa	Foto Copy KTP Kuasa	Perorangan, Perusahaan	Optional	-
16	Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)	Berkas Persyaratan 2 Rangkap (khusus permohonan offline dengan berkas fisik)	Perorangan, Perusahaan	Optional	-